TINJAUAN MADZHAB SHĀFI'Ī DAN MADZHAB ḤANBALĪ TENTANG ḤAID YANG TERPUTUS-PUTUS SERTA AKIBAT HUKUMNYA

Farida Ulvi Na'imah
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email: faridaulvi@yahoo.com

ABSTRACT

Many things open up opportunities for various interpretations of shari'ah contained in the Qur'an and as-Sunnah, including menstrual problems, especially in the case of intermittent menstruation. This study aims to explain the opinions and methods of the school of Sha fi'i and Ḥanbali about the intermittent menstrual problem and its consequences. School of Sha fi'i punishes naqa' in the age of n al-ḥ aid as menstruation period. The method used is the legal method b (leveling method), so that the legal consequences imposed are the inability to carry out worship during naqa ', such as prayer, fasting, intercourse, t awa f, t alaq, calculation of iddah and silence at mosque. Whereas the school of law anbali believes that the cessation of blood (naqa ') is punished sacred. This method is called the laqt method (acquisition). The legal consequences arising from the ability to carry out worship during naqa ', such as prayer, fasting, intercourse, t awa f, t alaq, calculation of iddah and silence in the mosque. This study concludes that the limitation of menstrual time is 10 days on average, so that in the span of 10 days if a blood break occurs, then the naqa according to the qaul aṣ ṣ ah is to bathe jina bat and perform worship services) recommended, such as prayer, fasting and so forth.

Keywords: School of Sha fi'i, School of Law Ḥanbali, Intermittent menstruation

ABSTRAK

Banyak hal yang membuka peluang terhadap berbagai penafsiran shari'ah yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, termasuk di dalamnya masalah haid, khususnya pada masalah haid yang terputus-putus. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendapat dan metode dari madzhab Shafi'i dan Hanbali tentang masalah haid yang terputus-putus beserta akibat hukumannya. Madzhab Shafi'i menghukumi naqa' dalam zaman al-ḥaid sebagai masa haid. Metode yang digunakan adalah metode saḥb (metode penyamarataan), sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah ketidakbolehan melaksanakan ibadah pada masa naqa', seperti shalat, puasa, bersetubuh, tawaf, talaq, perhitungan iddah dan berdiam diri di masjid. Sedangkan madzhab Hanbali berpendapat bahwa masa berhentinya darah (naqa') dihukumi suci. Metode ini disebut dengan metode laqt (perolehan). Akibat hukum yang ditimbulkan adalah kebolehan melaksanakan ibadah pada masa naqa', seperti shalat, puasa, bersetubuh, tawaf, talaq, perhitungan iddah dan berdiam diri di masjid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan lama waktu haid rata-rata adalah 10 hari, sehingga dalam rentang 10 hari jika terjadi putusnya darah, maka masa naqa'nya menurut qaul yang aṣṣah adalah melakukan mandi jinabat dan melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan, seperti shalat, puasa dan lain sebagainya.

Kata kunci : madzhab Shafi'i, madzhab Hanbali, haid yang terputus-putus

PENDAHULUAN

Haid yang terputus-putus adalah pengalaman sebagian besar kaum wanita yang sudah mengalami haid. Pengalaman itu yang menimbulkan akibat hukum dalam berbagai masalah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Ḥaid secara etimologi berarti sesuatu yang mengalir.¹ Sedangkan secara terminologi, ḥaid merupakan darah yang mengalir dari pangkal Rahim wanita setelah umur baligh dalam keadaan sehat.² Permasalahan ḥaid sendiri khususnya ḥaid yang terputus-putus tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an an Ḥadīth. Metode *istinbāt* yang digunakan dalam masalah ini adalah berdasarkan *istiqrā'* (kesimpulan dari khusus ke umum) yang dilakukan oleh para imam madzhab seperti as-Shāfi'i. *istiqrā'* as-Shāfi'i ini menghasilkan penetapan sekurang-kurangnya masa haid (akthar al-ḥaid) melalui *research* yang dilakukan as-Shāfi'i hanya pada wanita-wanita di negerinya dan pada zamannya.

Kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid. Jika tidak, maka suami atau wali wanita tersebut, yang mengerti akan hukum haid wajib mengajarkan. Adapun jika suami tidak mengerti, maka suami tersebut harus mmengizinkan istrinya unntuk belajar kepada orang yang mengerti. Haram hukumnya bagi suami melarang istri yang tengah belajar ilmu haid, kecuali jika suami tersebut belajar kemudian mengajarkan kepada istri.³ Bahkan menurut ad-Dimyāṭi, mengetahui hukum-hukum haid sama halnya mempelajari stengah lmu agama.⁴

Dalam permasalahan ḥaid yang terputus darahnya, akan ditinjau dari dua madzhab haitu madzhab Shāfi'i dan madzhab Ḥanbalī, karena dua madzhab tersebut memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Pendapat madzhab Shāfi'i dikenal dengan metode *as-Sahb* (metode penyamarataan),⁵ yaitu metode yang menghitung masa bersih diantara masa ḥaid dalam kurun waktu 15 hari sebagai bagian dari masa haid. Konsekuensinya adalah: apabila pada masa bersih dilakukan shalat, maka shalatnya tidak sah, tetapi wajib mengqāda. ketika melakukan puasa Ramaḍan, maka puasanya tidak sah dan wajib mengqāda karena masa tersbeut termasuk waktu haid. Metode *sahb* diwakili oleh mayoritas ulama madzhab Shāfi'i. tokoh-tokohnya adalah⁶ ar-Rāfi'i (w.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 314.

² Shams ad-Dīn Ibn 'Afi al-'Abbās ar-Ramli, *Nihāyah al-Muhtaj*, Juz (Kairo: Mustafa al-Bab Al-Halabi, 1938), 323.

³ Abū Muḥammad Ḥmad Ramli, 'Abd al-Majid, *Dalīl al-Maḥīd* (Gresik: ar-Rawḍah, 1425 H / 2004 M), 9.

⁴ Abū Bakr Ibn as-Sayyid ad-Dimyāṭi, *I'ānah at-Ṭalibīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 214.

⁵ Muḥammad Ibn Ḥmad a-Khaṭīb as-Sharbīnī, *Mugni al-Muhtaj*, Juz (Kairo: t.p, t.t), 70.

⁶ an-Nawawī, *al-Majmū 'Ala Sharḥ al-Muḥadzdzab*, II (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), 501.

623 H) dalam kitab *Fath al-Aziz bi Sharh al-Wajiz*, an-Nawawī (w. 676 H) dalam kitab *al-Majmū’ ala Sharh at-Talkhīs*, al-Ghazālī (w. 505 H) dalam *al-Khulāṣah*, al-Baghawī dan ar-Ruyyān dalam kitab *al-Baḥr*. karena banyaknya ulama madzhab, tentu mereka memiliki pendapat yang beragam meskipun metode yang digunakan sama, yaitu metode *as-Sahb* (penyamarataan).

Sedangkan madzhab Ḥanbalī disebut dengan metode *al-laqt* (metode temmuan)⁷ yaitu dengan menghitung waktu di mana kondisi haid darahnya keluar atau tidak, ketika masa keluar darah dihukumi haid, sedangkan dengan berhentinya darah (*naqa*)⁸ dihukumi suci. Tokoh-tokohnya seperti:⁸ al-Ḥajawī (w. 960 H) dalam kitabnya *Zād al-Mustaḥṣan* *fi Ikhtisār al-Muqanna’*, Maṣṣūr Ibn Yūnus al-Bahūtī (w. 1051 H) dalam kitabnya *Kasyf al-Qina’* *‘an-Matn al-Iqna’*, Ibn Qudāmah (w. 620 H) dalam *al-Mughnī*, dan Burḥān ad-Dīn Ibn Muflīḥ (w. 884 H) dalam *al-Mabda’*.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pendapat dan metode dari madzhab Shāfi’ī dan madzhab Ḥanbalī tentang masalah ḥaid yang terputus-putus beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua pendapat tersebut.

PEMIKIRAN MADZHAB SHĀFI’Ī TENTANG HAID YANG TERPUTUS-PUTUS

Dalam menjelaskan masalah haid yang terputus-utus, erat kaitannya mengetahui *zaman al-ḥaid* terlebih dahulu. Masa minimal haid antara 24 jam (1 hari 1 malam). Umumnya haid adalah 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, sedang paling lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam (360 jam)⁹. Jik akurang dari 24 jam makan tidak disbeut darah haid, begitu juga jika lebih drai 360 jam. Paling sedikitnya jarak waktu yang memisah antara satu haid dengan haid sebelumnya (aqal at-ṭuhr adalah 15 hari 15 malam).

Hal seperti ini dijelaskan as-Shinqīṭī bahwa dalam menyelesaikan masalah haid yang terputus-putus ini hendaknya memperhatikan kaidah *aqal al-ḥaid* (masa minimal haid). Menurut ulama Shāfi’iyah dan Ḥanabilah, batasan minimal yang disebut haid adalah sehari semalam. Contoh jika seseorang mengeluarkan darah setengah hari dan

⁷ Ibn Ḥajar al-Haitamī, *Minḥaj al-Qawīm*, Juz I (t.t: t.p, t.t), 120.

⁸ Burḥān ad-Dīn Ibn Muflīḥ, *al-Mabda’*, Juz I (Riyadh: Dar ‘Ālim al-Jutub, 2003), 240.

⁹ Abū Zakariya, Muḥyi ad-Dīn Ibn Sharaf an-Nawawī, *al-Majmū’ ‘ala Sharh al-Muhadhdhab*, Juz II (Damskus: Dar al-Fikr, t.t), 375. Lihat juga al-Ḥajawī, *al-Iqna’ fi Fiqh al-Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz I (Beirat: Dar al-Ma’rifah, t.t), 65.

suci sehari, maka darah tersebut belum bisa dihukumi darah haid, karena keluarnya darah kurang dari sehari semalam.¹⁰

Para ulama sepakat bahwa haid tidak disyaratkan darahnya keluar secara berkesinambungan pada masa haid itu, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum maa-masa berhenti darah (*naqa'*) pada hari-hari haid. Ada dua acara menyelesaikan masalah darah yang terputus-putus (*ad-Dām al-Mutaqaṭṭa'*), yaitu dengan metode *saḥb* atau dengan metode *laqt*.¹¹ Sedangkan metode *laqt*, yaitu dengan menghitung waktu dimana kondisi haid darahnya keluar atau tidak, masa ketika keluar darah dihukumi haid, sedangkan masa berhentinya darah (*naqa'*) dihukumi suci.

Dalam menyelesaikan permasalahan haid yang terputus-putus, madzhab Shāfi'i cenderung menggunakan metode *saḥb*, seperti pendapat Ibrahim al-Bajūrī bahwa paling sedikitnya haid yang bersamaan dengan darah lainnya tidak bersambung, tetapi diselingi masa suci.¹² Misalnya seorang wanita melihat darah beberapa waktu dan suci beberapa waktu. Semua itu dihitung haid dengan syarat tidak melewati 15 hari dan keluar waktu darahnya tidak kurang dari sedikitnya haid (24 jam). Ini disebut *qaul al-Saḥb*, karena mereka menarik hukum haid untuk waktu suci (*naqa'*) dan semuanya mereka hukumi haid. As-Sharbīnī (w. 977 H) juga menjelaskan bahwa darah yang kurang dari masa minimal haid (1 hari / 24 jam), dan *naqa'* yang keluar antara dua haid serta memenuhi syarat-syarat maka kami menghukuminya haid dan ini disebut dengan *qaul al-Saḥb*.¹³

Metode penyamarataan (*saḥb*) merupakan metode menghitung masa bersih diantara masa haid dalam kurun waktu 15 hari sebagai bagian dari masa haid.¹⁴ Adapun ulama-ulama yang berafiliasi dalam *qaul al-saḥb* seperti : ar-Rāfi'i (w. 623 H), an-Nawawī (w. 676 H), az-Zarkashī (w. 794 H), Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H), Zakariyā al-Anṣārī (w. 926 H), Abū Alī as-Sanjī dalam *Sharḥ al-Talkhīs*, al-Ghazālī dalam *al-Khulāṣah*, al-Baghawī dan ar-Ruyyān dalam kitab *al-Baḥr*.¹⁵ Paling sedikitnya jarak waktu yang memisah antara satu haid dengan haid sebelumnya (*qaul at-tuhr*) adalah 15

¹⁰ As-Shanqīt, *Sharḥ Zad al-Mustqna'*, 25:20

¹¹ Ibid.

¹² Ibrahim al-Bajūrī, *Ḥasbiyah al-Bajūrī*, Juz I (t.t: Dār al-Iḥyā' al-'Arabiyah, t.t), 110.

¹³ Muḥammad as-Sharbīnī al-Khaṭīb, *al-Iqna' fi Ḥal Alfād Abī Suja'*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H), 98.

¹⁴ Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb as-Sharbīnī, *Mugni al-Muḥtāj*, Juz 2 (Kairo: t.p, t.t), 70.

¹⁵ An-Nawawī, *al-Majmū' 'Ala Sharḥ al-Muhadhdhab*, II (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t), 501.

hari 15 malam. Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut:

1. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian 15 hari, terhitung dari permulaan haid pertama, maka semuanya dihukumi haid termasuk masa berhentinya darah (*naqā'*). Metode ini disebut dengan metode *saḥb* (secara Bahasa berarti menyamaratakan), yaitu menghitung masa bersih diantara masa haid dalam kurun waktu 15 hari sebagai bagian dari masa haid. Adapaun dijadikannya hukum haid ketika *naqā'* ini dua syarat:¹⁶

- a. Adanya *naqā'* ini harus diantara dua haid dalam waktu 15 hari.
- b. Kadar haidnya dalam 15 hari itu harus mencapai 24 jam.

Misal; keluar darah selama 3 hari. Berhenti (*naqā'*) selama 3 hari. Kemudian keluar lagi selama hari. Maka, *naqā'* 3 hari tersebut tetap dihukumi haid, sebab semuanya masih dalam masa-masa haid.

2. Bila darah kedua sudah keluar dari rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama, sementara masa pemisah ditambah darah pertama atau kedua tidak lebih dari 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah *fasād* (kotor).¹⁷ Misal: keluar darah yang pertama 3 hari, berhenti selama 12 hari, kemudian keluar darah yang kedua selama 3 hari. Maka, darah yang keluar 3 hari pertama dihukumi haid, 12 hari tidak keluar darah dihukumi suci, dan darah yang kedua karena belum didahului minimal masa suci. 3 hari yang terakhir dianggap sebagai darah *fasād*, dikarenakan 3 hari yang terakhir digunakan untuk menyempurnakan *naqā'* 12 hari yang sebelumnya tetap dianggap suci yang belum genap 15 hari.¹⁸

DASAR PENGAMBILAN HUKUM HAID MADZHAB SHĀFI'Ī

Permasalahan haid yang terputus-putus tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan ḥadith. Mengacu pada as-Shāfi'ī sebagai imam madzhab, maka metode *istinbāt* yang digunakan dalam masalah haid yang terputus-putus adalah *istiqrā'* mempelajari bagian-bagiannya untuk mengetahui kondisi serta keistimewaannya. Dasar atas penetapan

¹⁶ as-Sharḥinī, *Mugni al-Muḥtāj*, II: 70.

¹⁷ Ḥasan Baṣṣī, *al-Ḥawī*, I, 389.

¹⁸ ibn Ḥajar al-Haitamī, *Fatawa al-Kubrā al-Fiqhiyah*, Jilid I (Makkah: Dar al-Bāz, t.t), 86.

sekurang-kurangnya masa haid (*aqal al-ḥaid*), umumnya masa haid (*aghlāb*), dan sebanyak-banyaknya masa haid (*akhtar al-ḥaid*) melalui *istiqrā’ naqīs* (survey terbatas) karena research yang dilakukan as-Shāfi’i hanya pada wanita-wanita di negerinya dan pada zamannya, bahkan tidak pada wanita Arab secara keseluruhan. Hal ini seperti diungkapkan Ibrahim al-Bājūrī yang merupakan salah satu ulama madzhab Shāfi’i bahwa as-Shāfi’i berkata :”yang menjadi dasar dan dijadikannya pegangan atas yang demikian adalah *istiqrā’*, tentang sedikitnya waktu haid, sebanyak-banyaknya waktu haid, serta umunya haid adalah hasil penelitian as-Shāfi’i terhadap wanita Arab, dan tidak mungkin as-Shāfi’i memeriksa seluruh wanita di seluruh alam sehingga penelitian ini bisa disebut *istiqrā’ tam*, bahkan seluruh wanita di negerinya pada zamannya, beliau melakukan penyelidikan atas sebagian wanita Arab sehingga terbiasa atas dugaan umunya hukum yaitu *istiqrā’ naqīs*. sesungguhnya cara ini memang dapat memberikan faidah dugaan.

Masalah haid yang terputus-putus sendiri merupakan khilaf dikalangan *ashāb as-Shāfi’i*, karena pada masa as-Shāfi’i sendiri belum diketemukan haid yang terputus-putus. Khilaf itu bermula dari hasil *istiqrā’ as-Shāfi’i* bahwa *aqal al-ḥaid* adalah 24 jam, *aghlāb al-ḥaid* adalah 6/7 hari, dan *Akhtar al-ḥaid* adalah 15 hari, sehingga ketika ada kasus golongan tersebut, golongan *ashāb* terjadi *khilaf*. Sebagian berpendapat bahwa suci yang menyela-nyela haid terhitung haid, sebagian berpendapat tetap suci, sebab faktanya tidak keluar darah dan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 15 hari sebagai batas *mustahādah* yang memiliki hukum khusus dalam praktiknya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat madzhab Shāfi’i, jika dalam kurun waktu 15 hari keluar darah secara terputus-putus, maka terputusnya darah (*naqā’*) diantara dua haid tetap dihukumi haid. Metode seperti ini dikenal dengan metode *saḥb* (penyamaraan), karena masa berhentinya darah (*naqā’*) disamaratakan hukumnya sebagai haid.

PEMIKIRAN MADZHAB ḤANBALĪ TENTANG HAID YANG TERPUTUS-PUTUS

Adapun pendapat yang masyhur dikalangan madzhab Ḥanbalī adalah, jika darah keluar berarti haid dan jika darah berhenti berarti suci, kecuali apabila jumlah masanya melampaui batas maksimal masa haid yaitu 15 hari, maka darah yang keluar melampaui

batas maksimal tersebut disebut darah *istiḥādah*. Seperti pernyataan Ṣalih al-Uthaimin yang merupakan salah satu ulama madzhab Ḥanbalī:¹⁹ Barang siapa sehari melihat darah, dan sehari berhenti darahnya (*naqā'*), maka ketika darah keluar dihukumi haid, dan masa *naqā'*-nya dihukumi suci. Misalnya seorang wanita suatu hari melihat darah ketika waktu maghrib, dan di waktu maghrib berikutnya suci. Hukum berputar mengikuti '*illat*-nya, maka hari keluar darah dihukumi haid, sedangkan hari berhentinya darah dihukumi suci”.

Dari pernyataan di atas, hukum sesuatu itu didasarkan atas '*illat* (alasan) dari sesuatu tersebut. Karena adanya darah maka dihukumi haid, dan masa tidaknya adanya darah (*naqā'*) dihukumi suci. Hal lain seperti diungkapkan as-Shinqīṭi bahwa:²⁰ barang siapa melihat darah dan sehari kemudian *naqā'*, misalkan hari pertama haid, hari kedua suci, hari ketiga haid, hari keempat suci, seperti itulah sampai 5 hari. Pendapat kedua ini disebut *madzhab at-talfiq*. Ini merupakan pendapat ulama madzhab Ḥanbalī.

Menurut Ibn Qudamah al-Maqdisi, ketika seorang wanita sehari melihat darah dan sehari suci, maka pada masa suci wanita tersebut harus mandi dan sholat, seperti yang dikatakan 'Ibn Abbās; tidak boleh bagi wanita jika melihat suci hanya sesaat, kecuali jika wanita tersebut sudah mandi dan darah terputus-putus kurang dari 15 hari, jika kurang dari 15 hari maka seluruhnya dihukumi haid dan mandinya setiap hari dan shalat jika sudah benar-benar suci. Jika melalui waktu 15 hari (melebihi *zaman al-ḥaid*) maka wanita tersebut termasuk orang yang *istiḥādah*.²¹ Atas dasar ini, berhentinya darah yang kurang dari satu hari bukan merupakan kondisi suci, kecuali jika wanita tersebut mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa dia suci. Misalnya, berhenti darah tersebut terjadi pada akhir masa kebiasaan atau melihat lender putih.

DASAR PENGAMBILAN HUKUM HAID MADZHAB ḤANBALĪ

Dalam pengambilan hukum khususnya masalah haid, madzhab Ḥanbalī juga menggunakan metode *istiqrā'* seperti halnya madzhab Shāfi'i. Namun, bagi madzhab Ḥanbalī *istiqrā'* hanya dianggap sebagai metode pengambilan dalil yang akan

¹⁹ Muḥammad Ibn Ṣalih al-‘Uthaimin, *as-Sharḥ al-Mumtī'*, Juz I (t,t : Dār Ibn al-Jawzī, 1442 H), 500.

²⁰ Muḥammad Ibn Muḥammad al-Mukhtar as-Shinqīṭi, *Sharḥ Zad al-Mustaqna'*, Juz 25 : 20.

²¹ Muwaffiq ad-Dīn 'Abd Allāh Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kāfi fī al-Fiqh al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, t,t), 148.

memberikan implikasi hukum general. Artinya, *istiqrā'* tidak lebih hanyalah upaya pengambilan dalil yang berfungsi mengeneralisasikan sebuah fakta.²²

Dalam hal ini berbeda dengan madzhab Shāfi'i yang menggunakan metode *istiqrā'* sebagai penguat hukum, madzhab Ḥanbalī memandang bahwa metode *istiqrā'* hanya sebagai sarana perwujudan hukum, karena tidak terdapat penjelasan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadith.

Madzhab Shāfi'i menggunakan metode *istiqrā'* sebagai penguat hukum dengan melihat realita pada masyarakat, sehingga dalam konteks haid ditemukan masa minimal, maksimal dan umumnya haid, melihat kondisi diatas, rupa-rupanya madzhab Ḥanbalī cenderung lebih menyukai penggunaan metode *istidlāl* atau konklusi hukum yang kemudian secara langsung menarik kesimpulan dari paparan al-Qur'an dan sunnah.

STUDI PUSTAKA

Sumber primer dalam pembahasan ini adalah kitab-kitab yang mengulas tentang pendapat ulama madzhab Shāfi'i seperti : ar-Rāfi'i (w. 623 H) dalam kitabnya *Fath al-'Aziz bi Sharḥ al-Wajīz*, an-Nawawī (w. 676 H) dalam kitabnya *al-Majmū' 'ala Sharḥ al-Muhadhdhab*, Ibn Hajar al-Haitami dalam *Minhaj al-Qawīm*, Abū 'Ali as-Sanji dalam *Sharḥ al-Talkhis*, al-Ghazali, (w. 505 H) dalam *al-Khulāṣah*, al-Baghawī dan ar-Ruyyān dalam kitab *al-Baḥr* serta sumber primer dari madzhab Ḥanbalī seperti: al-Ḥajawī (w. 960 H) dalam *Zād al-Mustaqna' fi Ikhtisār al-Muqana'*, Manṣūr Ibn Yūnus al-Bahūtī (w. 1051 H) dalam kitabnya *Kasyf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Ibn Qudāmah (w. 620 H) dalam *al-Mugni*, dan Burhān ad-Dīn Ibn Muflih (w. 884 H) dalam *al-Mabda'*.

Sumber data sekunder merupakan pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan namun ada kesamaan tema yang dikembangkan, dalam hal ini literatur yang dipakai adalah *Mugni al-Muḥtāj* karangan Khaṭīb as-Sharīnī, *Ḥāshiyah as-Sharwānī* karangan 'Abd al-Majīd as-Sharwānī, dan lain-lain.

Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus *al-Munawwir*, artikel-artikel, jurnal, dan juga data dari internet yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian.

²² Muḥammad Sulaimān Ibn 'Abd Allāh al-Ashqar, *al-Waḍīḥ* (Amman; Dār al-Fath, 1992), 157.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan mengacu serta menelaah data-data ilmiah berupa kitab-kitab klasik dan modern serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan haid. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisa isi) agar diperoleh suatu pemahaman yang akurat.

ANALISIS, HASIL DAN DISKUSI

Dari pemikiran madzhab Shāfi'ī dan madzhab Ḥanbali, tentang haid yang terputus-putus, maka menghasilkan akibat hukum yang berbeda terhadap masalah shalat, puasa, persetubuhan, *tawaf*, *talaq*, perhitungan masa 'iddah, menyentuh dan membaca al-Qur'an serta berdiam diri di masjid. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. para ulama sepakat atas keharaman shalat baik farḍ maupun sunnah bagi perempuan had. An-Nawawī mengatakan:²³ “Mereka sepakat atas gugurnya kewajiban shalat bagi orang haid dan mereka sepakat pula bahwa mengqada shalat yang ia tinggalkan pada masa haid tidak wajib menggantikannya”.
2. Untuk puasa wajib yang ditinggalkan ketika haid, maka harus di-*qada*, sementara untuk shalat yang ditinggalkan tidak harus di-*qada*, sebab hal ini akan memberatkan wanita tersebut dalam kondisi lemah karena keluarnya darah dari dalam tubuhnya. Belum lagi gangguan psikis dan fisik yang mengiri selama masa haid. Sementara itu, ibadah puasa juga menyebabkan kondisi tubuh menjadi lemah. Bila wanita haid tetap diwajibkan berpuasa, akan sangat memberatkan kondisi wanita tersebut. Secara logis, itulah kira-kira mengapa puasa tidak dibebankan kepada wanita yang sedang haid.²⁴
3. Untuk bersetubuh saath haid, diharamkan bagi seorang suami menggauli istrinya sampai dia benar-benar dalam keadaan suci. Diharamkan pula bagi sang istri memberi kesempatan kepada suami untuk melakukan hal tersebut. Adapun dalam pemaknaan suci para ulama berbeda pendapat sebagai berikut; menurut Abu

²³ An-Nawawī, *al-Majmū'*, II: 503.

²⁴ Lissa Malike dan Asmawati, *Haid Membawa Berkah*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), 57-58.

Ḥanīfah, suci bermakna berhentinya darah.²⁵ Sehingga konsekuensinya, seorang suami boleh bersetubuh dengan istrinya setelah darah berhenti keluar, meskipun belum mandi *jinābat*. Sedangkan menurut *Jumhūr ulama*, yaitu as-Shāfi‘ī, Mālik, dan Ibn Ḥanbal, suci ditandai dengan mandi *jinābat*.²⁶ Adapun bersenang-senang dengan istrinya masih diperbolehkan selama tidak sampai bersetubuh. Meskipun diperbolehkan melakukan *istimta’* (bersenang-senang), namun hal seperti ini dimungkinkan dapat mengantarkan pelakunya melakukan *jima’*, sehingga jika mengikuti kaidah *sadd ad-darā’i* (mencegah terjadinya bahaya), maka menjauhinya adalah lebih baik. Menurut as-Sha’rawī alasan lain yang mendasari larangan untuk melakukan hubungan intim saat haid antara lain karena alasan kesehatan.²⁷ Beliau menegaskan, bahwa bagi laki-laki, darah haid bisa menyebabkan masuknya bakteri penyakit ke dalam tubuh melalui kemaluan wanita.

4. Hukum *ṭalāq* adalah *mubah*. Namun, *ṭalāq* itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya *makrūh*. *ṭalāq* hanya boleh dilakukan dalam keadaan mendesak. Meskipun dalam keadaan mendesak, *ṭalāq* tidak boleh dijatuhkan sembarang waktu. Syari’at memperbolehkan suami menjatuhkan *ṭalāq* terhadap istri ketika sedang suci dari haid. Sementara itu, seorang suami haram melakukan *ṭalāq* terhadap istrinya dalam keadaan haid. Hal ini sesuai dengan firman Allah:²⁸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar)”.

Menceraikan istri semasa haid, menyebabkan istri tidak mendapatkan ‘iddah-nya secara wajar. Bila istri diceraikan semasa haid, maka sisa waktu haid belum bisa dimulai perhitungan masa ‘iddah.²⁹ Hal ini dilarang, karena bisa memperpanjang waktu ‘iddah istri, karena harus menunggu sampai istri tersebut suci kemudian

²⁵ Alī as-Ṣabūnī, *Tafsir Ayāt al-Aḥkam*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 301.

²⁶ Ibid

²⁷ Muḥammad Mutawalli as-Sha’rawī, *Fiqh Wnanita*, (Jakarta: Pena, 2005), 25.

²⁸ al-Qur’an, 65 (at-Ṭalāq): I

²⁹ Abū Muḥammad Aḥmad Ramli, *Dalīl al-Maḥīd*, 70.

haid kembali, baru perhitungan *‘iddah* dimulai. Namun, jika suami menjatuhkan *ṭalaq* ketika istri dalam keadaan suci, maka saat itu pula sudah bisa dimulai perhitungan *‘iddah* bagi istri, sehingga waktu *‘iddah* yang dijalani istri tidak terlalu lama. Diharamkan juga men-*ṭalaq* istri yang sedang suci tetapi sudah disetubuhi, karena bisa jadi persetubuhan tersebut mengakibatkan kehamilan.

5. Sesuai dengan pembahasan haid, maka *‘iddah* yang akan dibahas adalah *‘iddah* perempuan yang sedang haid, yaitu tiga kali *qurū’*, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT. yang artinya:³⁰ *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Namun para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”*.

Yang menjadi persoalan di sini adalah pengertian *qurū’* yang *mushtarak*, yaitu mengandung arti lebih dari satu. Kadang diartikan *“ath-tuhr”* (suci) dan kadang-kadang-kadang diartikan pula *al-hayḍah* (haid). Masing-masing dari arti lafad *qurū’* ini menghasilkan deduksi hukum yang berbeda.

As-Shāfi‘ī, berpendapat bahwa *qurū’* bermakna *ṭuhr* (suci), hal ini didasarkan atas teori *‘adad – ma’dūd*. Lafaz *qurū’* merupakan isim *‘adad*, dimana jika *‘adad*-nya (lafaz *thalāthah*) menunjukkan *mu’annath*, maka *ma’dūd*-nya (yang terbilang) yaitu lafaz *qurū’* harus menunjukkan *mudakar*. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa *qurū’* bermakna suci (*ṭuhr*) karena menunjukkan nama *mudakar*.³¹ Lafaz *qurū’* bermakna suci (*ṭuhr*) disepakati oleh *fuqahā’* Mesir, as-Shāfi‘ī, Ḥanbalī, Jumhur Ahl-Madinah, Abū Thaur, sahabat Ibn ‘Umar, Zaid Ibn Thabit, dan Ā’ishah.³²

³⁰ Al-Qur’ān, 2 (al-Baqarah): 228.

³¹ ‘Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Qalam, 1978), 172.

³² Ibn Rushd al-Andalusī, *Bidayah al-Mujathid wa Hidayah al-Muqtasid*, Juz II (Jakarta: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 67).

Sedangkan Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa *qurū'* bermakna haid. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa kebersihan rahi, (*barā'at ar-raḥm*) hanya bisa diketahui dengan haid, tidak dengan suci.³³ *Qurū'* bermakna haid disepakati oleh Abū Ḥanīfah, Sufyan al-Thaurī, al-Awza'i, Ibn Abī Laylā, sahabat 'Umar Ibn Khaṭṭab, Ibn Mas'ūd, dan Ali Ibn Abi, Ṭalīb.³⁴

Dari penjelasan diatas, peneliti memakai pendapat jumhur, bahwa *qurū'* bermakna suci. Meskipun akibat hukum antara pendapat madzhab Shāfi'i (*qaul as-sahb*) dan madzhab Ḥanbalī (*qaul al-laqt*) memiliki perbedaan yang cukup signifikan, namun dalam permasalahan perhitungan *'iddah* kedua pendapat in selaras dan tidak bertentangan. Perhitungan *'iddah* 3 kali suci maksudnya setelah 3 daur, dimana 1 daur adalah 1 kali minimal suci (15 hari) + 1 kali minimal haid (1 hari 1 malam / 24 jam) = 16 hari. Maka, dalam kasus haid yang terputus-putus, ketika masa *naqa'* (darah berhenti keluar) pada hari-hari haid, belum bisa dimulai perhitungan *'iddah*, karena perhitungan *'iddah* baru bisa dimulai setelah suci mutlak.

6. Membaca dan Menyentuh al-Qur'an

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa wanita yang haid dilarang untuk membaca al-Qur'an (dengan hafalannya). Di sisi lain, Abū Bakr as-Shaṭa ad-Dimyāṭi yang merupakan salah seorang ulama madzhab Shāfi'i memperbolehkan membaca al-Qur'an bagi orang haid dan junub asalkan dengan niat berdzikir.³⁵ beliau menjelaskan bahwa haram membaca al-Qur'an (niat bertujuan membaca al-Qur'an) bagi orang yang junub, kecuali jika tidak ada niat membacanya, seperti niat dzikir, ceramah-ceramah yang mengandung ayat al-Qur'an, cerita yang kebetulan cocok dengan isi al-Qur'an atau niat menghafal. Begitu juga tidak haram jika memutlakannya, artinya mengucapkannya pada lisan tanpa bertujuan apa-apa.

³³ Muḥammad 'Alī as-Ṣabūnī, *Rawā'ī al-Bayān Tafsīr Ayat al-Aḥkām min al-Qur'an*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 329.

³⁴ Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, II: 67.

³⁵ Abū Bakr as-Shaṭa, *I'ānah at-Ṭalibīn* (Indonesia : Dar-Ihya', t.t), 69.

Begitu juga dalam kitab *Jawāhir al-Bukhārī* disebutkan bahwa bagi orang yang haid atau junub diperbolehkan membaca al-Qur'an asalkan dengan niat dzikir mutlak (khususnya bagi orang yang hal al-Qur'an).

Demikian halnya dalam kitab *Sharḥ Umdah al-Aḥkām*, para ulama memperbolehkan bagi para penghafal al-Qur'an untuk menjaga hafalannya dengan terus melafadkan al-Qur'an meskipun sedang haid dan junub, karena ajika tidak begitu dikhawatirkan akan hilang hafalannya. Namun dalam dalil ini, membaca al-Qur'an tetap diperbolehkan tetapi memegang mushaf al-Qur'an tidak diperbolehkan.³⁶

Adapun permasalahan tidak bolehnya menyentuh mushaf bagi orang yang berhadath adalah pendapat mayoritas *fuqaha'*, dan ulama' yang memperbolehkannya terbatas dalam keadaan darurat seperti kegiatan belajar mengajar. Adapun bagi orang yang berhadath seperti junub, haid, nifas haram untuk menyentuh mushaf karena atidaj adanya kesucian.

7. Berdiam diri di Masjid

Sebagian ulama melarang seseorang yang haid dan junub untuk masuk dan berdiam diri di masjid, namun ketika seseorang berhajat hendak mengambil barangnya yang tertinggal di masjid maialnya atau hanya lewat melintas maka hal tersebut diperbolehkan.³⁷

Menurut *qaul³⁸ aṣah* (pendapat yang lebih sah) dari kalangan madzhab Shafi'i yang berafiliasi terhadap *qaul as-saḥb³⁹* jika diketahui pada hari pertama haid selama 24 jam, dan pada hari kedua *naqa'*, maka diharuskan mandi dan diperbolehkan melaksanakan amalan-amalan ketika suci seperti puasa, shalat, tawaf, membaca al-Qur'an, menyentuh muṣṣhaf, dan sebagainya, meskipun pada kenyataannya keluar darah lagi pada hari berikutnya selama masih berada pada *zaman al-ḥaid*. Langkah bersuci tersebut diambil berdasarkan asumsi (perkiraan)

³⁶ Ibn Jibrīn, *Sharḥ Umdah al-Aḥkām*, VII: 15.

³⁷ Muḥammad Shams al-Ḥaq Ibn Abi Ṭayyib, *'Aun al-Ma'būd 'Ala Sharḥ Suanan Abī Dawūd*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), 269.

³⁸ Qaul Shaḥīḥ yang berafiliasi pada *qaul as-Saḥb* terbagi atas *qaul aṣah* dan *qaul laqt*.

³⁹ Madzhab Shafi'i terbagi atas *qaul aṣah* (pendapat yang lebih sah) dan *qaul da'īf* (pendapat yang lemah).

sebagai langkah *ih̥tiyāt* bnetuk kehati-hatian meskipun pada akhirnya jika diketahui keluar darah lagi, ibadah-ibadah tersbeut dianggap batal.⁴⁰

Sedangkan menurut *qaul da'if* (pendapat yang lemah) dari madzhab Shāfi'i, tidak perlu terburut-buru melakukan shalat sebelum menunggu suci mutlak, karena ibadah yang akan dilakukan pada masa *naqa'* tersebut dianggap sia-sia / batal, sehingga diperbolehkan menunggu (tidak bersuci dahulu dan tidak melakukan ibadah apapun) sampai benar-benar suci mutlak.⁴¹

Haid yang dinyatakan berhenti jika kemaluannya betul-betul sudah bersih. Untuk mengetahui haid sudah berhenti mutlak ialah, andaikan kapas putih dimasukkan kedalam *farji* sudah tidak ada basahnya darah walaupun ada bagian *farji* yang tidak wajib di basuh waktu bersuci⁴² atau ketika diusap dengan kapas, sudah tidak ada cairan yang sesuai dengan sifat dan warna darah (hanya berupa cairan bening). Namun, bila masih ada cairan yang berwarna keruh dan kuning, terjadi khilaf diantara para ulama. Menurut Jumhur, warna tersebut masih dihukumi darah haid, karena menganggap masih berwarna darah.⁴³ Sebagian lain menyebutkan warna tersebut bukan darah haid, karena menganggap warna tersebut tidak berwarna darah.⁴⁴ Jika ternyata darah yang keluar selama beberapa hari tidak encapai 24 jam / 1 hari 1 malam, maka darah tersebut dihukumi darah fasad,⁴⁵ dan wanita tersebut wajib mengganti shalat sejumlah hari yang ditinggalkan.

Meskipun madzhab Shāfi'i terbagi menjadi dua pendapat, tetapi pada intinya kesimpulan hukum yang dihasilkan dalam masalah haid yang terputus-putus adalah sama yaitu, ketika masa terputusnya darah (*naqa'*) dihukumi haid.

⁴⁰ Pendapat ini merupakan pendapat yang lebih sah. Lihat dalam an-Nawawī, *al-Majmū'*, II: 502-503. Ibid., II: 503

⁴¹ Hal ini merupakan pendapat madzhab Shāfi'i yang *da'if*. Lihat Ibid.

⁴² Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, IV: 254.

⁴³ Warna darah haid tidak harus berwarna merah, dan darah berwarna merah juga belum tentu darah haid. Karena menghukumi darah itu disebut darah haid ada beberapa syarat-syarat, yaitu memahami darah haid harus memahami warna sifat, dan waktu lamanya mengeluarka darah. Adapun warna darah antara lain ; Merah kehitam-hitaman, merah, merah kekuning-kuningan, kuning, kuning keputih-putihan (krem keruh). Sedangkan sifat darah antara lain kental, cair, bau anyir menyengat, dan bau anyir tidak menyengat. Lihat dalam Saifuddin Zuhri, *Haid dan Problematika Wanita* (Mojokerto: Majma' al-Bahrain, 2010), 35.

⁴⁴ As-Sharbinī, *Mughni al-Muhtaj*, I: 113.

⁴⁵ Ad-Dimyāṭi, *I'ānah at-Ṭalibīn*, I: 72.

Sedangkan menurut madzhab Ḥanbalī yang condong terhadap *qaul al-laqt*, masa *naqā'* dalam haid tersebut boleh melakukan shalat, karena masa *naqā'*-nya dihukumi suci. Tetapi dalam praktiknya tetap mandi terlebih dahulu, seperti orang suci pada umumnya.⁴⁶ Ibadah-ibadah yang dilakukan pada masa *naqā'* dianggap sudah sah, sehingga tidak perlu diqada' meskipun beberapa hari kemudian diketahui keluar darah lagi selama masih dalam *zaman al-haid*.

Jika ternyata selama beberapa hari darah yang keluar tersebut jumlahnya tidak mencapai 24 jam / 1 hari 1 malam, maka darah tersebut dihukumi *fasad*⁴⁷ dan wanita tersebut harus mengganti shalat yang ditinggalkan hanya dengan membersihkan farjinya saja (tanpa mandi *jinābat*), tetapi yang disunnahkan adalah mandi.⁴⁸ Keunggulan *qaul as-sahb*, serta intensitas beribadahnya juga lebih banyak.

Dari dua perbedaan pendapat di atas (madzhab Shāfi'ī yang condong kepada *qaul as-sahb* dan Ḥanbalī yang condong kepada *qaul al-laqt*), peneliti mengambil jalan tengah untuk keduanya. Erat kaitannya masalah haid dihubungkan dengan lama waktu, hal ini juga disepakati madzhab Shāfi'ī dan Ḥanbalī. Mereka menentukan masa haid paling sedikit (*aqal al-tuhr*) adalah sehari semalam (24 jam) baik terjadi secara terus menerus dalam satu hari, atau dalam rentang waktu maksimal 15 hari namun keluarnya secara terputus-putus. Masa paling lama (*Akhtar al-haid*) kedua madzhab juga menyepakati 15 hari. Namun yang membedakan keduanya hanya perlakuan terhadap *naqā'* ketika masa terputusnya darah dalam rentang waktu 15 hari.

Penelitian yang dilakukan kedua imam madzhab tersebut berada di kawasan jazirah arab yang secara geografi dan topografi berbeda dengan orang Indonesia. Sumber nutrisi yang diterima kedua wilayah tersebut juga berbeda sehingga diperkirakan juga akan mempengaruhi lama haid. Hal ini yang menurut penulis perlu melakukan penelitian ulang terhadap sejumlah wanita Indonesia yang erat hubungannya dengan masalah haid. Penelitian ini penulis lakukan terhadap 100

⁴⁶ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfi fi Fiqh Ibn Ḥanbal*, Juz I (t.t:t.p, t:t), 113.

⁴⁷ Darah fasad adalah darah rusak. Adapun hukumnya sama seperti darah *istiḥādah*.

⁴⁸ Ibn Ṣāliḥ al-Uthaimin, *as-Sharḥ al-Mumtī*, I: 500.

orang yang diperkirakan bisa mewakili orang wanita pada umumnya.⁴⁹ Hasilnya ditemukan bahwa umumnya waktu haid adalah 708 hari. Masa paling lama haid adalah 10-12 hari.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa batasan lama waktu haid adalah 10 hari, sehingga dalam rentang 10 hari jika terjadi putusnya darah, maka masa *naqa'*nya lebih baik melakukan mandi *jinabat* dan melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan, seperti shalat, dan puasa. Adapun diterima atau tidaknya ibadah yang kita lakukan pada masa *naqa'* haid adalah semata-mata urusan Allah. Langkah ini juga merupakan langkah hati-hati (*ihtiyat*) dalam mengaplikasikan sebuah hukum. Keunggulan lainnya adalah intensitas ibadah yang dilakukan juga lebih banyak dibanding jika kita menunggu sampai 15 hari sampai terbukti mengalami suci secara mutlak.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa : Pendapat madzhab Shāfi'i tentang darah haid yang terputus-putus yaitu menghukumi masa *naqa'* dalam *zaman al-haid* sebagai haid. Metode yang digunakan adalah metode *saḥb* (metode penyamarataan), karena masa terputusnya darah disamaratakan hukumnya sebagai haid. Pendapat madzhab Shāfi'i sendiri terbagi atas dua, yaitu *qaul aṣah* (yang lebih sah) dan *qaul da'if*. Menurut madzhab Shāfi'i yang *aṣah* (yang lebih sah), ketika masa terputusnya darah (*naqa'*) dihukumi haid, tetapi setiap masa *naqa'* dianjurkan mandi *jinabat* dan melakukan ibadah seperti yang biasa dilakukan orang suci seperti shalat, puasa, ṭawāf, kecuali bersetubuh. Pendapat ini yang erat hubungannya sangat menjaga sistem produksi wanita, karena pada masa *naqa'* masih terjadi percampuran antara darah bersih dan darah kotor. Adapun jika diketahui darah keluar lagi kemudian hari maka ibadah-ibadah tersebut dianggap batal (tidak sah). Sedangkan menurut madzhab Shāfi'i yang *da'if*, masa *naqa'* tidak perlu terburu-buru melakukan ibadah-ibadah seperti puasa,

⁴⁹ Objek penelitian adalah santri PP. Al-Hidayah, Ketegan, Tanggulangin, Sidoarjo, penelitian dilakukan pada 100 santri yang sudah mengalami haid berkali-kali. Penelitian dilakukan pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 2011.

shalat karena pada hari-hari tersebut ibadah yang dilakukan terhitung batal sebelum suci mutlak.

Menurut madzhab Ḥanbalī, masa berhentinya darah (*naqā'*) dihukumi suci. Metode ini disebut dengan metode *laqt* (perolehan). Dinamakan demikian karena ketika terlihat (memperoleh) darah dihukumi haid, ketika darah terputus (*naqā'*) dihukumi suci. *Qaul* ini disebut juga *talfiq* (secara Bahasa adalah mencampur, karena dalam qaul ini dalam waktu 15 hari atau kurang, bisa terjadi percampuran antara hari haid dan suci secara silih berganti). Menurut madzhab Ḥanbalī, waktu *naqā'* dalam haid tersebut boleh melakukan shalat, puasa, persetubuhan, *tawāf*, *talaq*, membaca dan menyentuh al-Qur'an dan masuk masjid, karena masa *naqā'* nya dihukumi suci. Tetapi dalam praktiknya tetap mandi terlebih dahulu, seperti orang suci pada umumnya.

Peneliti sendiri menyimpulkan bahwa batasan lama waktu haid pada umumnya adalah 10 hari, sehingga dalam rentang 10 hari jika terjadi putusnya darah, maka masa *naqā'* nya lebih baik melakukan mandi *jinābat* dan melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan, seperti shalat dan puasa.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-Majīd, Abū Muḥammad Aḥmad Ramli *Dalil al-Maḥīd*, Gresik, ar-Rawḍah, 1425 H/2004 M

al-Ashqar, Muḥammad Sulaimān Ibn ‘Abd Allāh, *al-Waḍīḥ*, Amman: Dār al-Fath, 1992.

al-Bahūti, Manṣūr Ibn Yūnus *Kashf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, Mesir: t.p, t.t.

al-Bajūrī, Ḥāshiyah al-Bajūrī ‘ala Ibn al-Qasīm, Semarang, Toha Putera, t.t.

al-Baṣri, Abū Ḥasan ‘Ali Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb al-Baghdādī, *al-Ḥawī fi Fiqh as-Shāfi’i*, Mesir: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang, Toha Putera, 1995.

ad-Dimyaṭī, Abū Bakr Ibn as-Sayyid, *I’annah at-Ṭalibīn*, Juz 3, Beirut; Dār al-Fikr, t.t.

al-Haitamī, Ibn Ḥajar, *Minḥaj al-Qawīm*, t.t, t.p, t.t.

_____, *Fatawā al-Kubrā al-Fiqhiyah*, Makkah: Dār al-Bāz, t.t.

al-Ḥajāwī, Sharaf ad-Dīn Ibn Mūsā Ibn Aḥmad Ibn Mūsā Abū an-Najā, *Zād al-Mustaḥṣan ‘fi Ikhtisār al-Muḥanna’*, tahqiq ‘Abd ar-Raḥman Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad al-‘Assakir, Riyad, Dār Waṭan li an-Nashr, t.t.

- _____, *al-Iqnā' fi Fiqh al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fida' Isma'il Ibn 'Amr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aḍīm*, taḥqīq Sāmī Ibn Muḥammad Salāmah, t.t: Dār Tayyibah, 1999.
- Ibn Mufliḥ, Burhān ad-Dīn *al-Mabda'*, Riyadh, Dār 'Alīm al-Kutub, 2003.
- Ibn Qudāmah, Muwafiq ad-Dīn 'Abd ar-Raḥman al-Maqdisī, *Sharḥ al-Kabīr*, t.t, t.p, t.t.
- _____, *al-Mugni*, Damaskus, al-Mausū'ah al-'Arabuyah al-'Alimiyah, t.t.
- _____, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Ibn Rushd, al-Andalusī, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Jakarta, Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah.
- al-Jurjānī, Ali Ibn Muḥammad as-Sayyid as-Sharīf, *Kitāb at-Ta'rīfāt*, t.t: Dār al-Irsyad, t.t.
- al-Makki, Muḥammad Nuruddin Banjar, *Fiqh Darah Perempuan*, Solo, Intermedia, 2002.
- Malike, Lissa dan Asmawati, *Haid Membawa Berkah*, Jakarta, Niaga Swadaya, 2010.
- Misbah AB, *Teori Praktis Seputar Haid*, Gresik: ar-Rawḍah, 2010.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2000.
- an-Nawawī, Abū Zakariyā Ibn Sharag, *al-Minhāj 'ala Sharḥ al-Muslīm*, Beirut: Dār Iḥyā' at-Turath al-'Arabī, 1392 H.
- _____, Abū Zakariyā Muḥyi ad-Dīn Ibn Sharaf _____, *al-Majmū' 'Ala Sharḥ al-Muḥadhdhab*, Damaskus, Dār al-Fikr, t.t.
- Nuruddin, Muḥammad Banjar al-Makki, *Fiqh Darah Perempuan*, Solo, Intermedia, 2002.
- ar-Rafī'i, Abd al-Karīm Ibn Muḥammad al-Qazwīnī, *Fath al-'Azīz bi Sharḥ al-Wajīz: Sharḥ al-Kabīr*, t.t: t.p, t.t.
- ar-Ramlī, Shams ad-Dīn Ibn 'Alī al'Abbās, *Nihayah al-Muhtāj*, Kairo, Muṣṭafa al-Bāb al-Ḥalabī, 1938.
- as-Sharbīnī, Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb, *Mugni al-Muhtāj*, Kairo, t.p, t.t.
- _____, *al-Iqnā' fi Hal Alfād Abī Sujā'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.
- at-Tirkī, Muḥsin, *Uṣūl Madhhab al-Imām Aḥmad*, Riyadh: Maktabah ar-Riyāḍ al-Hadīthah, 1980.
- Al-Uthaimin, *Muḥammad Ibn Ṣāliḥ as-Sharg al-Mumtī'*, t.t, Dār al-Ibn Jawzī, 1422 H.

‘Uwaidah, Muḥammad, *Aḥmad Ibn Ḥanbal Imām Ahl as-Sunnah*, Beirut, Dār al-Kuub al-‘Ilmiyah, t.t.

Warson Munawwir, Aḥmad, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Zuhri, Saifuddin, *Haid dan Problematika Wanita*, Mojokerto, Majma’ al-Baḥrain, 2010.